JIIC: JURNAL INTELEK INSAN CENDIKIA
https://jicnusantara.com/index.php/jiic
Vol : 2 No: 5, Mei 2025
E-ISSN : 3047-7824

DEMOKRATISASI DAN TANTANGAN POLITIK IDENTITAS DALAM SISTEM POLITIK INDONESIA KONTEMPORER

DEMOCRATIZATION AND THE CHALLENGES OF IDENTITY POLITICS IN THE CONTEMPORARY INDONESIAN POLITICAL SYSTEM

Olivia Rizka Vinanda[1], Andrie Koza[2], Dela Aulia Fatikasari[3], Maulana malik Ibrahim[4] Sinar Putri[5], Yulia Shabrina P[6]
Hukum Tata Negara|Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung
Email: andriekoza6@gmail.com[1], delaauliafatikasari@gmail.com[2], maulana2021123@gmail.com[3] snrptrrr22@gmail.com[4], Yuliasabrinana1@gmail.com[5]

Article Info

Article history :
Received : 19-05-2025
Revised : 21-05-2025
Accepted : 23-05-2025
Pulished : 25-05-2025

Abstract

Democratization in Indonesia has experienced significant developments since the reform era in 1998, marked by direct general elections, freedom of the press, and increased public participation in the political process. However, this process also brings new complex challenges, one of which is the strengthening of identity politics in various political contestations, both at the national and local levels. Identity politics refers to the practice of utilizing group identity based on religion, ethnicity, or culture as a tool for mobilization and electoral strategy. This phenomenon is often used to gain voter sympathy with an exclusive approach, which ultimately has the potential to create polarization and social fragmentation. This article aims to analyze the dynamics of identity politics in the context of contemporary Indonesian democratization, using a qualitative-descriptive approach. The results of the analysis show that although democracy opens up space for broader participation and freedom of expression, it also opens up gaps for political practices that exploit social identities. Therefore, concrete efforts are needed to manage diversity inclusively and build a political system that is not only procedurally democratic, but also substantively.

Keywords: Democratization, Identity Politics, Political System, Reform

Abstrak

Demokratisasi di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi tahun 1998, ditandai dengan pemilihan umum langsung, kebebasan pers, dan peningkatan partisipasi masyarakat dalam proses politik. Namun, proses ini juga membawa tantangan baru yang kompleks, salah satunya adalah menguatnya politik identitas dalam berbagai kontestasi politik, baik di tingkat nasional maupun lokal. Politik identitas merujuk pada praktik memanfaatkan identitas kelompok baik berdasarkan agama, suku, maupun budaya sebagai alat mobilisasi dan strategi elektoral. Fenomena ini sering kali digunakan untuk mendapatkan simpati pemilih dengan pendekatan yang eksklusif, yang pada akhirnya berpotensi menciptakan polarisasi dan fragmentasi sosial. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dinamika politik identitas dalam konteks demokratisasi Indonesia kontemporer, dengan menggunakan pendekatan kualitatif-deskriptif. Hasil analisis menunjukkan bahwa meskipun demokrasi membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas dan kebebasan berekspresi, ia juga membuka celah bagi praktik-praktik politik yang eksploitatif terhadap identitas sosial. Oleh karena itu, perlu upaya konkret untuk mengelola keberagaman secara inklusif dan membangun sistem politik yang tidak hanya demokratis secara prosedural, tetapi juga substansial.

Kata kunci: Demokratisasi, Politik Identitas, Sistem Politik, Reformasi

PENDAHULUAN

Proses demokratisasi di Indonesia telah menjadi bagian integral dari transformasi politik nasional sejak jatuhnya rezim Orde Baru. Reformasi yang dimulai pada tahun 1998 menandai dimulainya era baru yang ditandai dengan keterbukaan politik, desentralisasi kekuasaan, dan peningkatan peran masyarakat sipil. Dalam kerangka ini, demokrasi dipandang sebagai sistem politik yang memberikan ruang partisipasi bagi semua elemen masyarakat tanpa diskriminasi (Romli & Nurlia, E., 2023).

Namun demikian, transisi menuju demokrasi tidak selalu berjalan mulus. Dalam konteks masyarakat yang multikultural seperti Indonesia, dinamika politik tidak hanya berkutat pada isu-isu kebijakan dan pembangunan, tetapi juga menyangkut identitas kolektif. Demokrasi membuka peluang bagi munculnya berbagai kelompok kepentingan yang menjadikan identitas agama, etnis, dan budaya sebagai alat mobilisasi politik. Fenomena ini dikenal sebagai politik identitas.

Meskipun pada satu sisi politik identitas dapat memperkuat representasi kelompok minoritas dan memperjuangkan hak-hak sipil, pada sisi lain ia juga dapat menimbulkan eksklusivisme dan konflik horizontal. Dalam beberapa kasus, politik identitas dimanfaatkan oleh elite politik untuk mendulang suara pemilih dengan cara-cara yang tidak selalu mencerminkan nilai-nilai demokrasi, seperti kampanye negatif, penyebaran hoaks, dan ujaran kebencian berbasis SARA.

Oleh karena itu, penting untuk memahami hubungan antara proses demokratisasi dan menguatnya politik identitas dalam konteks sistem politik Indonesia kontemporer. Studi ini bertujuan untuk mengeksplorasi bagaimana politik identitas berkembang dalam ruang demokratis, apa dampaknya terhadap integrasi sosial dan kualitas demokrasi, serta bagaimana strategi yang dapat dilakukan untuk mengatasi tantangan tersebut secara konstruktif dan berkeadilan.

Teori demokratisasi menyatakan bahwa dalam sistem politik yang terbuka, aktor politik cenderung memobilisasi dukungan melalui berbagai cara, termasuk melalui simbol dan identitas kelompok. Teori politik identitas menyoroti bagaimana identitas sosial baik berbasis agama, etnis, atau budaya dapat digunakan sebagai alat untuk meraih kekuasaan politik.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi pustaka (library research), yang bertujuan untuk mengeksplorasi dan memahami fenomena politik identitas dalam dinamika demokratisasi Indonesia kontemporer secara mendalam dan kontekstual. Pendekatan kualitatif dipilih karena sesuai untuk menggambarkan proses-proses sosial dan politik yang kompleks serta tidak dapat dikuantifikasi secara numerik. Dengan metode ini, peneliti berusaha mengungkap makna di balik tindakan politik dan narasi yang berkembang dalam ruang publik (Moleong, L. J., 2017).

Data dikumpulkan dari berbagai sumber sekunder yang kredibel, seperti jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku akademik, artikel berita dari media massa terpercaya, serta laporan-laporan penelitian dari lembaga think-tank dan organisasi masyarakat sipil. Proses pengumpulan data dilakukan dengan cara telaah literatur yang sistematis untuk memperoleh pemahaman menyeluruh mengenai fenomena yang dikaji.

Selanjutnya, data dianalisis secara deskriptif-analitis. Analisis deskriptif digunakan untuk menggambarkan bagaimana politik identitas muncul dan berkembang dalam sistem politik Indonesia, sementara analisis analitis bertujuan untuk menilai dampak politik identitas terhadap kualitas demokrasi dan kohesi sosial. Validitas data diperoleh melalui triangulasi sumber, yakni membandingkan dan mengkroscek informasi dari berbagai referensi untuk mendapatkan pemahaman yang obyektif dan mendalam.

Dengan pendekatan ini, diharapkan penelitian mampu memberikan kontribusi konseptual terhadap kajian demokrasi dan politik identitas, sekaligus memberikan rekomendasi kebijakan yang relevan untuk memperkuat demokrasi substansial di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Perkembangan Demokratisasi Pasca-Reformasi

Sejak jatuhnya rezim Orde Baru pada tahun 1998, Indonesia memasuki era reformasi yang menandai dimulainya proses demokratisasi secara lebih luas dan terbuka. Reformasi ini mendorong perubahan besar dalam struktur politik dan pemerintahan, termasuk di antaranya pelaksanaan pemilihan umum secara langsung, baik di tingkat nasional maupun daerah, serta penguatan lembaga-lembaga perwakilan seperti Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Selain itu, dibentuk pula sejumlah lembaga independen seperti Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Komisi Pemilihan Umum (KPU), dan Ombudsman Republik Indonesia, yang berfungsi untuk memastikan akuntabilitas dan transparansi dalam jalannya pemerintahan. Di ranah kebebasan sipil, hak-hak untuk berpendapat, berkumpul, dan berorganisasi semakin dijamin secara konstitusional dan memperoleh ruang praktik yang lebih luas dibandingkan masa sebelumnya (Mubarok, S., 2023).

Namun demikian, transisi menuju demokrasi substantif tidak berlangsung tanpa hambatan. Sejumlah kajian dan pengamatan menunjukkan bahwa demokrasi Indonesia saat ini masih bersifat prosedural, yakni menekankan pada mekanisme formal seperti pemilu berkala, tanpa dibarengi dengan penguatan nilai-nilai substantif demokrasi itu sendiri. Pemilu memang telah menjadi sarana rutin untuk memilih pemimpin dan wakil rakyat, namun partisipasi politik warga masih cenderung pasif dan terbatas pada aktivitas memilih saja. Dalam banyak kasus, pemilih belum memahami secara utuh peran mereka sebagai warga negara dalam sistem demokrasi, termasuk pentingnya pengawasan terhadap wakil rakyat, partisipasi dalam proses legislasi, serta keterlibatan dalam forum-forum diskusi public (Davidson, J. S., 2023).

Selain itu, literasi politik yang rendah di berbagai kalangan masyarakat menjadikan mereka rentan terhadap manipulasi informasi dan propaganda politik. Kampanye politik cenderung bersifat simbolik dan personalistik, menonjolkan citra dan popularitas tokoh ketimbang gagasan dan program kerja. Praktik politik uang juga masih marak terjadi, terutama dalam kontestasi politik lokal seperti pilkada. Hal ini tidak hanya mencederai prinsip keadilan dan kesetaraan dalam pemilu, tetapi juga melemahkan akuntabilitas pemimpin terpilih yang merasa tidak bertanggung jawab pada rakyat, melainkan pada sponsor politik yang membiayai kampanyenya (Juliansyah, E., 2023).

Kelemahan lainnya terlihat pada partai politik yang seharusnya menjadi pilar utama demokrasi. Banyak partai masih berfungsi sebagai kendaraan elektoral semata, bukan sebagai institusi kaderisasi dan pendidikan politik. Internal partai sering kali bersifat oligarkis, dengan dominasi elite yang kurang memberikan ruang partisipasi bagi kader muda atau kelompok marginal. Akibatnya, kualitas pemimpin politik yang dihasilkan pun tidak selalu mencerminkan aspirasi dan kebutuhan masyarakat luas (Ni'matul, 2023).

Dalam konteks ini, demokrasi Indonesia menghadapi tantangan serius dalam mewujudkan demokrasi yang tidak hanya prosedural, tetapi juga substantif. Diperlukan upaya sistematis untuk meningkatkan pendidikan politik, memperkuat kapasitas partai politik, menegakkan hukum terhadap praktik politik transaksional, dan membangun budaya politik yang sehat berdasarkan deliberasi, transparansi, serta akuntabilitas. Tanpa hal-hal tersebut, demokrasi Indonesia berisiko stagnan atau bahkan mengalami kemunduran.

2. Eksploitasi Identitas dalam Kompetisi Politik

Keterbukaan demokratis yang seharusnya dimanfaatkan untuk memperkuat representasi inklusif, justru dimanfaatkan sebagian aktor politik untuk mengeksploitasi identitas sosial terutama agama, etnis, dan ras dalam kontestasi kekuasaan. Politik identitas tidak lagi hanya muncul sebagai refleksi sosial, tetapi menjadi strategi elektoral yang sistematis (Kholisoh, S., 2023).

Pilkada DKI Jakarta 2017 menjadi titik krusial dalam melihat bagaimana sentimen keagamaan dimobilisasi untuk memenangkan suara, bukan melalui gagasan, tetapi melalui simbol dan narasi eksklusif. Dalam banyak kasus, elite politik menggunakan kesamaan identitas untuk membangun loyalitas kelompok, meskipun strategi ini sering kali mengarah pada eksklusi sosial dan polarisasi yang merugikan kelompok minoritas (Fajri, P. C., 2024).

3. Implikasi Politik Identitas terhadap Kualitas Demokrasi

Eksploitasi identitas berdampak negatif terhadap kualitas demokrasi. Identitas yang semestinya menjadi kekayaan sosial budaya justru dikapitalisasi menjadi alat eksklusif untuk mencapai kepentingan elektoral. Dalam jangka panjang, strategi ini menciptakan segregasi sosial, memperkuat stereotip, serta menurunkan kepercayaan antar kelompok masyarakat (Erinaldi, 2023).

Selain itu, politik identitas cenderung mengalihkan fokus publik dari isu-isu kebijakan publik yang substantif, seperti pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan. Pemilih lebih diarahkan untuk menentukan pilihan berdasarkan sentimen primordial ketimbang program rasional dan kapasitas kepemimpinan. Kondisi ini menyebabkan penurunan kualitas demokrasi secara substansial karena proses politik tidak lagi menjadi ruang kompetisi gagasan, melainkan ajang mobilisasi massa berbasis kesamaan identitas (Sujito, A., 2022).

4. Dinamika Politik Identitas dalam Demokratisasi Kontemporer

Pendekatan kualitatif-deskriptif menunjukkan bahwa demokrasi pasca-reformasi membuka dua sisi realitas: di satu sisi, ia memberi ruang bagi ekspresi identitas yang sebelumnya terpinggirkan, seperti komunitas adat, agama minoritas, atau kelompok

kepercayaan. Ini mencerminkan kemajuan demokrasi dalam menjamin kebebasan berpendapat (Fatayati, 2023).

Namun di sisi lain, celah ini dimanfaatkan untuk memproduksi narasi-narasi politik yang eksklusif. Identitas digunakan bukan sebagai alat penguatan representasi, tetapi sebagai alat pragmatis untuk memenangkan suara dengan jalan pintas. Fenomena ini diperkuat oleh media sosial yang menyebarkan narasi identitas secara masif, disertai disinformasi dan ujaran kebencian yang memperkuat segregasi sosial (Pebrian & Muslih., 2023).

Dengan demikian, keterbukaan demokrasi justru menciptakan ruang yang rawan bagi praktik-praktik politik eksploitatif. Kecenderungan pragmatisme elite politik, lemahnya pendidikan politik, serta minimnya regulasi atas politik sektarian menyebabkan demokrasi Indonesia belum sepenuhnya matang secara substansial.

5. Strategi Penanggulangan Politik Identitas dalam Sistem Demokratis

Untuk membangun demokrasi yang tidak hanya prosedural tetapi juga substansial, perlu upaya konkret dan multidimensi. Pendidikan politik menjadi strategi utama yang harus diperkuat sejak dini, baik melalui jalur formal di sekolah maupun melalui media publik. Literasi politik harus diarahkan agar masyarakat memahami bahwa demokrasi bukan sekadar memilih, tetapi juga menilai gagasan dan integritas calon pemimpin (Apriando, A., 2024).

Selanjutnya, penguatan masyarakat sipil menjadi penting untuk mengawasi proses politik dan mengadvokasi nilai-nilai inklusif. Organisasi keagamaan, kelompok pemuda, dan tokoh lokal memiliki peran strategis dalam menyuarakan narasi alternatif yang membangun harmoni sosial.

Regulasi juga harus diperkuat. Negara perlu merumuskan aturan hukum yang lebih tegas dalam menangani kampanye berbasis kebencian dan ujaran diskriminatif. Platform media sosial harus diajak berkolaborasi dalam memfilter konten provokatif dan membangun etika komunikasi digital.

Terakhir, partai politik sebagai pilar utama demokrasi harus bertransformasi menjadi institusi yang meritokratis dan programatik. Platform partai harus merepresentasikan kepentingan rakyat secara luas, bukan semata-mata kelompok identitas tertentu. Dengan demikian, demokrasi Indonesia akan berkembang secara lebih inklusif, adil, dan bermartabat (Meilani Zakiah, A., 2024).

KESIMPULAN

Dinamika politik identitas dalam konteks demokratisasi Indonesia kontemporer menunjukkan paradoks yang signifikan. Di satu sisi, reformasi politik sejak 1998 telah membuka ruang bagi partisipasi yang lebih luas, kebebasan berekspresi, serta keterlibatan masyarakat dalam proses politik. Demokrasi prosedural seperti pemilu langsung dan penguatan lembaga negara mencerminkan kemajuan struktural. Namun di sisi lain, keterbukaan tersebut turut menghadirkan tantangan serius berupa eksploitasi identitas sosial oleh aktor politik untuk tujuan elektoral.

Hasil analisis menunjukkan bahwa politik identitas kerap digunakan secara pragmatis untuk membangun dukungan elektoral berbasis agama, suku, atau ras, yang pada akhirnya memperlemah kohesi sosial dan menurunkan kualitas demokrasi substantif. Partisipasi politik

menjadi simbolik dan berorientasi pada kesamaan identitas, bukan pada pertimbangan rasional atas program dan kapabilitas kandidat. Bahkan, media sosial memperparah fragmentasi sosial melalui penyebaran disinformasi dan ujaran kebencian berbasis identitas.

Oleh karena itu, demokrasi Indonesia memerlukan penguatan secara substansial, tidak hanya pada aspek prosedural. Pengelolaan keberagaman secara inklusif, peningkatan literasi politik masyarakat, serta peran aktif lembaga pendidikan, civil society, dan media dalam membangun narasi demokrasi yang sehat menjadi langkah strategis yang perlu terus dikembangkan. Tanpa upaya ini, demokrasi yang seharusnya memperkuat keadilan dan kesetaraan, justru berpotensi menjadi alat pembenaran atas fragmentasi sosial dan dominasi politik berbasis identitas.

DAFTAR PUSTAKA

Apriando, A. (2024). Politik identitas, ancaman demokrasi dan ketahanan nasional. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 6(1), 1–20.

https://scholarhub.ui.ac.id/jkskn/vol6/iss1/5/

Davidson, J. S. (2023). *Demokrasi Indonesia Pasca-Orba: Antara Inovasi, Stagnasi, dan Polarisasi*. INSISTPress.

Erinaldi. (2023). Politik identitas dan konsolidasi demokrasi di Indonesia pasca-reformasi. *Jurnal Ilmu Administrasi Negara*, 21(2), 100–115. https://jurnal.universitasmbojobima.ac.id/index.php/jian/article/view/244

Fajri, P. C. (2024). Dominasi politik identitas dalam kontestasi politik Indonesia serta mitigasinya jelang Pemilu 2024. *Politeia: Jurnal Ilmu Politik*, 5(2), 30–45. https://talenta.usu.ac.id/politeia/article/download/14360/7654/63108

Fatayati. (2023). Politik identitas, pemilu, demokrasi. *Sosioyustisia: Jurnal Ilmu Sosial dan Hukum*, 5(1), 50–65.

https://jurnalpps.uinsa.ac.id/index.php/sosioyustisia/article/view/411

Juliansyah, E. (2023). *Sistem Politik Indonesia Pasca Reformasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Kholisoh, S. (2023). Pengaruh politik identitas terhadap demokrasi di Indonesia. *Jurnal Ketahanan Nasional*, 9(4), 110–125.

https://jurnal.lemhannas.go.id/index.php/jkl/article/download/419/290/

Meilani Zakiah, A. (2024). Pengaruh politik identitas dalam kestabilan ketatanegaraan di Indonesia. *Siyasah: Jurnal Hukum Tata Negara*, 4(2), 180–193. https://e-journal.metrouniv.ac.id/siyasah/article/download/8596/4107/35192

Mubarok, S. (2023). Akar politik identitas di Indonesia. *JISIERA: The Journal of Islamic Studies and International Relations*, 6, 1–19.

https://journal.insiera.org/index.php/jisiera/article/download/40/41/209

Moleong, L. J. (2017). *Metodologi penelitian kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.

Ni'matul. (2023). *Penataan Demokrasi & Pemilu di Indonesia Pasca Reformasi*. Gramedia Pustaka Utama.

Pebrian & Muslih. (2023). Dampak politik identitas pada pemilihan umum 2024 mendatang. *Inovasi Pembangunan: Jurnal Kelitbangan*, 11(2), 225–240.

https://www.researchgate.net/publication/373266395_DAMPAK_POLITIK_IDENTITAS_PADA_PEMILIHAN_UMUM_2024_MENDATANG

Romli & Nurlia, E. (2023). Menimbang isu politik identitas pada Pilkada DKI Jakarta tahun 2024. *Jurnal Ilmu Pemerintahan dan Politik*, 9(2), 75–90. https://jurnal.unsil.ac.id/index.php/jipp/article/view/8944

Sujito, A. (2022). Pancasila dan politik emansipasi: Problematisasi politik identitas menuju Pemilu 2024. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 3(2), 45–60. https://jurnal.ugm.ac.id/pancasila/article/view/79923